

Analisis *Good Corporate Governance* Pada Pengelolaan Keuangan Di Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta Kabupaten Pasuruan

Muhammad Afif Rifqi, Khoirul Huda

¹²Universitas Yudharta Pasuruan

Email: rifqiafif588@gmail.com, budarecht@yudharta.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini berada di PERUMDA Air Minum Giri Nawa Tirta Kabupaten Pasuruan. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan bahwa 1) Transparansi pengelolaan keuangan di perusahaan air minum kabupaten Pasuruan terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dalam keterbukaan, pengumpulan, dan pelaporan informasi terkait keuangan perusahaan. 2) Akuntabilitas pengelolaan keuangan di perusahaan air minum kabupaten Pasuruan terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dalam fungsi, sistem, struktur, dan pertanggung jawaban orang-orang perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana dengan efektif. 3) Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di perusahaan air minum kabupaten Pasuruan terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4) Kemandirian pengelolaan keuangan di perusahaan air minum kabupaten Pasuruan terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat bahwa masing-masing organ perusahaan menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif. 5) Kewajaran pengelolaan keuangan di perusahaan air minum kabupaten Pasuruan terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat bahwa perusahaan memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan juga memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

Kata sandi: Analisis, *Good Corporate Governance*, Keuangan, Air Minum.

Abstract

This study used a qualitative approach and descriptive research. The research location was at the Regional Drinking Water Company (PERUMDA) Giri Nawa Tirta in Pasuruan Regency. Data analysis techniques used data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study indicate that: 1) Transparency in financial management at the Pasuruan Regency drinking water company is well-implemented. This can be seen in the openness, collection, and reporting of information related to the company's finances. 2) Accountability in financial management at the Pasuruan Regency drinking water company is well-implemented. This can be seen in the functions, systems, structures, and responsibilities of company personnel, enabling effective management. 3) Accountability in financial management at the Pasuruan Regency drinking water company is well-implemented. This can be seen in the company's management in accordance with applicable laws and regulations. 4) Independence in financial management at the Pasuruan Regency drinking water company is well-implemented. This can be seen in the fact that each company organ avoids domination by any party, is not influenced by particular interests, is free from conflicts of interest, and is free

from any influence or pressure, enabling objective decision-making. 5) The fairness of financial management at the Pasuruan Regency drinking water company is well-executed. This is evident in the company's provision of opportunities for stakeholders to provide input and express opinions on behalf of the company's interests. The company also provides equal and fair treatment to stakeholders in accordance with their benefits and contributions to the company.

Keywords: *Analysis, Good Corporate Governance, Finance, Drinking Water.*

Pendahuluan

Indonesia telah mengadopsi konsep Good Corporate Governance (GCG) sejak tahun 1997, sebagai respons terhadap krisis ekonomi yang melanda negara tersebut dan beberapa negara Asia lainnya. GCG merupakan prinsip universal yang menjadi acuan dan sistem yang dinamis, menyesuaikan dengan sistem hukum, kondisi, perkembangan kemajuan, serta kultur bangsa. Implementasi GCG di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan perusahaan, serta meningkatkan kepercayaan investor dan stakeholders. Dengan demikian, GCG menjadi penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. (Edi Wibowo, 2016) .

Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu sistem tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip fundamental, meliputi: 1. Keterbukaan (transparansi), 2. Akuntabilitas (pertanggungjawaban), 3. Pertanggungjawaban (responsibilitas), 4. Profesionalisme, dan 5. Kewajaran (fairness). GCG didefinisikan sebagai suatu mekanisme pengelolaan organisasi yang efektif dan efisien, dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut untuk mencapai tujuan organisasi secara optimal. Implementasi GCG bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas organisasi, serta meningkatkan kepercayaan stakeholders. (Amelinda & Anwar, 2021)

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. 01/2011 Pasal 44 (1), BUMN diwajibkan melakukan evaluasi berkala setiap 2 tahun terhadap kualitas penerapan Good Corporate Governance (GCG). Evaluasi ini terdiri dari dua bentuk, yaitu: 1. Penilaian (assessment) atas pelaksanaan GCG dan 2. Evaluasi (review) atas tindak lanjut rekomendasi perbaikan dari hasil penilaian sebelumnya. Prinsipnya, BUMN melakukan penilaian mandiri, sedangkan penilaian independen dilakukan oleh penilai yang kompeten dan ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Penerapan GCG yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan stakeholders dan nilai perusahaan. Untuk mencapai hal ini, perusahaan mengintegrasikan GCG dengan pengelolaan kepatuhan, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Penerapan ini menjadi strategis bagi perusahaan untuk meningkatkan nilai dan mempertahankan pertumbuhan berkelanjutan.

Kinerja perusahaan mencerminkan kondisi keuangan yang dianalisis dengan alat analisis keuangan. Evaluasi kinerja sangat penting untuk mengoptimalkan sumber daya dalam menghadapi perubahan lingkungan. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas, serta meningkatkan kepercayaan stakeholders (Sulistiowati & Nurmansyah, 2017). Tujuan perusahaan adalah meningkatkan kinerja operasional dan manajemen, serta memanfaatkan peluang bisnis secara optimal, untuk menjadi perusahaan perkebunan yang berdaya saing tinggi, makmur, dan menghasilkan laba. Hal ini

bertujuan untuk mensejahterakan karyawan dan berperan dalam pembangunan ekonomi. Perusahaan berupaya melaksanakan pembangunan dan pengembangan agribisnis sektor perkebunan dengan prinsip perusahaan yang sehat, kuat, dan tumbuh dalam skala usaha yang ekonomis. Namun, terdapat beberapa kelemahan dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG), seperti: Minimnya pelaporan kinerja keuangan dan kewajiban perusahaan, Kurangnya pengawasan atas aktivitas manajemen oleh komisaris dan auditor, Kurangnya insentif untuk mendorong efisiensi melalui mekanisme persaingan yang fair.

Kelemahan ini disebabkan oleh beberapa kendala yang dihadapi perusahaan dalam melaksanakan GCG. Meskipun terdapat kelemahan, sistem GCG tetaplah sangat penting bagi perusahaan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. (Merida & Ak, n.d.). Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta Pasuruan merupakan salah satu contoh perusahaan daerah yang mengimplementasikan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Sebagai penyedia air minum bagi masyarakat, perusahaan ini wajib memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, operasional, dan administrasi. Pengelolaan keuangan yang efektif dan transparan sangat penting untuk mengungkapkan kondisi perusahaan. Namun, laporan keuangan Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta Pasuruan tidak mudah diakses oleh publik karena bersifat rahasia perusahaan.

Penerapan prinsip GCG dapat membantu perusahaan meningkatkan kinerja dan mengurangi risiko korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi GCG pada bagian keuangan Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta Pasuruan, dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan dan efektivitas penerapan prinsip GCG dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dan meningkatkan kepercayaan stakeholders. Dari uraian tersebut, penelitian ini mengambil judul "*Analisis Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Keuangan di Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta Pasuruan*"

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan menganalisis penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan keuangan di Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta Kabupaten Pasuruan. (Sugiono, 2011) Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai proses, pola, dan praktik tata kelola perusahaan daerah yang dijalankan, bukan sekadar pada data kuantitatif. (Sugiono, 2017) Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilaksanakan dengan informan kunci, yaitu jajaran direksi, bagian keuangan, auditor internal, serta pihak terkait lainnya yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Observasi dilakukan untuk melihat langsung praktik tata kelola keuangan, termasuk transparansi, akuntabilitas, serta mekanisme pengawasan yang diterapkan. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa laporan keuangan, laporan tahunan, peraturan internal, serta dokumen kebijakan yang relevan. (Sugiono, 2017)

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap

reduksi, data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dipilih sesuai dengan indikator GCG, yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran. Data yang telah disusun kemudian disajikan dalam bentuk narasi dan tabel tematik, sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi pola maupun permasalahan yang muncul. Untuk menguji keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, dengan cara membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih objektif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis komprehensif mengenai sejauh mana prinsip-prinsip Good Corporate Governance diterapkan dalam pengelolaan keuangan Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta Kabupaten Pasuruan. (Sugiono, 2020)

Hasil dan Pembahasan

A. Pengertian Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia analisis merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagian dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan (Kementrian Pendidikan, n.d.). Dapat dikatakan bahwa analisis kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis biasanya dilakukan dalam konteks penelitian maupun pengolahan data. Hasil analisis diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman serta mendorong pengambilan keputusan. Analisis data merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk menguraikan, menginterpretasikan, dan mengolah data untuk mencapai kesimpulan. Sederhananya analisis menjadi tahapan dalam proses penelitian dimana data-data yang dikumpulkan akan dilakukan interpretasi atau menguraikan data untuk menjawab permasalahan penelitian. Berdasarkan pengertian ini, diketahui bahwa analisis data menjadi proses penting dalam penelitian ini, proses dalam mengolah data menjadi informasi berharga.

B. Pengertian *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance berasal dari bahasa Inggris, yaitu good yang berarti baik, corporate berarti perusahaan dan governance artinya pengaturan. Secara umum, istilah *Good Corporate Governance* diartikan dalam bahasa Indonesia dengan tata kelola perusahaan yang baik. *Good Corporate Governance* ialah sebuah sistem tata kelola organisasi berisi peraturan dimana mengatur terkait hubungan antara kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Sistem ini merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan organisasi dan bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah (added value) bagi setiap pihak yang memiliki kepentingan (stakeholders) (Crystha Armereo, 2021). Stakeholder sendiri merupakan pihak yang berada dalam masyarakat, baik perorangan atau kelompok yang memiliki sebuah kepentingan dalam suatu perusahaan yang saling berhubungan dan terikat.

B. Kinerja Keuangan

Kinerja merupakan hasil yang dicapai seseorang atau organisasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks perusahaan, kinerja keuangan adalah hasil yang dicapai oleh perusahaan dalam mengelola keuangan secara efektif dan efisien untuk *mencapai tujuan bisnis dan memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan*. Menurut Hery (2017), kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam

mengelola dan mengendalikan sumber daya keuangannya selama periode tertentu yang dapat dilihat melalui laporan keuangan, yang mencerminkan keberhasilan dalam menghasilkan laba, menjaga likuiditas, dan mengelola struktur modal. Kinerja keuangan menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan suatu perusahaan dalam menjalankan aktivitas usahanya. Informasi mengenai kinerja keuangan sangat penting untuk berbagai pihak, seperti manajemen, investor, kreditor, dan pemegang saham dalam mengambil keputusan strategis. Menurut Brigham dan Houston (2013) serta Hery (2017), terdapat beberapa dimensi utama dalam menilai kinerja keuangan perusahaan, yang dirangkum ke dalam beberapa rasio keuangan sebagai indikator kunci:

1. Profitabilitas

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualan atau aset yang dimiliki. Kinerja keuangan yang baik tercermin dari tingginya laba bersih yang dihasilkan. Indikator profitabilitas antara lain:

- Return on Assets (ROA)

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Rasio ini digunakan untuk mengukur profitabilitas perusahaan secara menyeluruh. Semakin tinggi ROA maka semakin tinggi keuntungan yang diperoleh oleh bank dan semakin baik posisi perusahaan dilihat dari penggunaan asetnya.

- Return on Equity (ROE)

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih setelah pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba dari saham. Semakin tinggi nilai ROE maka semakin baik bank tersebut dalam menghasilkan laba berdasarkan modal sendiri.

- Beban Operasional pada Pendapatan Operasional (BOPO)

$$BOPO = \frac{\text{Total beban operasional}}{\text{Total pendapatan operasional}} \times 100\%$$

Rasio ini mengukur seberapa efektif kegiatan operasional. Semakin tinggi nilai BOPO maka perusahaan dikatakan tidak efektif.

- Net Profit Margin (NPM)

$$NPM = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total pendapatan operasional}} \times 100\%$$

Rasio ini digunakan untuk membandingkan laba bersih dengan pendapatan operasional. Semakin tinggi NPM maka semakin baik.

2. Likuiditas

Likuiditas mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar. Likuiditas yang baik menunjukkan kesehatan keuangan perusahaan dalam jangka pendek. Indikator likuiditas antara lain:

- Loan to Deposit Ratio (LDR)

$$LDR = \frac{\text{Jumlah Kredit}}{\text{Dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

Rasio ini digunakan untuk mengetahui jumlah kredit dibandingkan dengan dana pihak ke tiga. Semakin rendah LDR maka perusahaan dapat dikatakan semakin likuid.

- Loan to Assets Ratio (LAR)

$$LAR = \frac{\text{Jumlah Kredit yang diberikan}}{\text{Jumlah Aset}} \times 100\%$$

Rasio ini digunakan untuk mengetahui berapa besar kredit yang disalurkan dibandingkan dengan aset yang dimiliki. Semakin rendah LAR maka perusahaan dapat dikatakan semakin baik.

3. Solvabilitas

Solvabilitas atau leverage menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Solvabilitas berkaitan erat dengan struktur modal dan risiko keuangan perusahaan. Indikator solvabilitas antara lain:

- Debt to Equity Ratio (DER)

$$DER = \frac{\text{Jumlah Hutang}}{\text{Jumlah Modal sendiri}} \times 100\%$$

Rasio ini digunakan untuk mengetahui besarnya utang dengan modal yang dimiliki perusahaan. semakin tinggi DER maka perusahaan dikatakan tidak baik karena tidak dapat menutupi hutangnya hanya dengan modal sendiri.

- Capital Adequacy Ratio (CAR)

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal dalam mengatasi kerugian yang disebabkan oleh risiko perusahaan. semakin tinggi nilai CAR maka semakin baik karena semakin besar kemampuan bank meminimalisir risiko.

4. Aktivitas

Rasio aktivitas menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan pendapatan. Rasio ini menilai sejauh mana perusahaan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Indikator aktivitas diantaranya :

- Total Asset Turnover
- Inventory Turnover

C. Pengelola Keuangan

Pengelolaan merupakan istilah, yang dimana berasal dari kata “kelola” yang berarti segala usaha yang miliki tujuan untuk memanfaatkan semua potensi yang dimiliki secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan (Haryoso, 1997). Sedangkan keuangan merupakan ilmu dan kemampuan dalam mengendalikan uang yang dapat mempengaruhi keberadaan setiap orang dan organisasi. Keuangan sendiri berkaitan dengan lembaga, pasar, dan instrumen lain yang terlibat dalam proses transfer uang baik diantara personal maupun antar bisnis dan pemerintah (Weston, J.F. dan Copeland, 1998). Pengelolaan keuangan adalah aktivitas keuangan yang berkaitan dengan perencanaan, pencatatan, pengendalian, dan pelaporan keuangan yang bertujuan untuk memastikan kelangsungan hidup suatu bisnis yang dijalankannya. Adapun fungsi pengelolaan keuangan untuk melakukan

perencanaan keuangan berkaitan dengan perencanaan aliran kas dan laba perusahaan; untuk mengalokasikan biaya usahanya secara tepat; sebagai bahan evaluasi keuangan jika terdapat selisih antara perencanaan dengan aktualnya; dan dijadikan sebagai indikator pelaporan keuangan. Menurut Kuswadi ada empat kerangka dasar di dalam pengelolaan keuangan yaitu (Kuswadi, 2015):

1. Perencanaan

Aktivitas perencanaan keuangan yang diperlukan untuk mencapai tujuan keuangan tertentu yang hendak dicapai oleh perusahaan. Indikator yang terdapat di dalam perencanaan keuangan, yaitu dengan merumuskan anggaran jangka panjang. Dengan adanya perumusan penganggaran keuangan yang baik, sebuah usaha akan berjalan dengan baik dan lebih banyak usaha yang akan berhasil.

2. Pencatatan

Aktivitas pencatatan pemasukan dan pengeluaran keuangan mengenai segala aktivitas transaksi keuangan yang dilakukan di dalam suatu usaha secara rinci. Pencatatan transaksi keuangan diperlukan di dalam memenuhi kebutuhan usaha, agar dapat memberikan informasi keuangan secara relevan kepada para pengguna laporan keuangan, serta dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar kedepannya.

3. Pelaporan

Tahapan setelah pencatatan keuangan selesai, dan informasinya digunakan oleh para pemangku kepentingan dan publik. Kerangka pelaporan keuangan harus mempunyai karakteristik keuangan yang disajikan secara transparan, disajikan secara lengkap, dan bersifat konsisten. Indikator pada pelaporan keuangan ini meliputi laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan posisi keuangan.

4. Pengendalian

Tahapan ini dilakukan untuk membandingkan dan mengevaluasi perencanaan keuangan yang direncanakan dengan perolehan laba aktual yang tujuannya untuk memperoleh umpan balik. Pengendalian keuangan ini diperlukan untuk setiap fase di dalam usaha untuk mencapai kesuksesan, dan disesuaikan dengan kebutuhan porsi usahanya. Ketika ukuran usahanya semakin berkembang, maka pengendalian keuangan yang diperlukan akan semakin kompleks (Hidayat et al., 2022). Pengelolaan keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Baik itu menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Pengelolaan keuangan dikatakan baik jika dilakukan dengan adil, transparan dan menjaga kepercayaan masyarakat. Perusahaan yang menjaga kepercayaan masyarakat menjadikannya perusahaan yang dapat menjaga etika dalam berbisnis.

D. Perusahaan

Perusahaan merupakan bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah NKRI yang bertujuan memperoleh keuntungan (Sentosa, 2006). Tentunya setiap perusahaan memiliki tujuan yang akan dicapai, baik itu tujuan jangka Panjang maupun jangka pendek. Menurut ahli keuangan, tujuan didirikannya perusahaan tidak jauh berbeda satu sama lain, hanya cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang berbeda. Adapun tujuan perusahaan menurut ahli

keuangan meliputi pada memaksimalkan nilai Perusahaan, memaksimalkan keuntungan atau laba, menciptakan dan memberikan kesejahteraan bagi stakeholder, menciptakan citra perusahaan, meningkatkan tanggung jawab sosial (Gunawan et al., 2016). Tercapai tidaknya tujuan dari berdirinya sebuah perusahaan diukur dari harga saham perusahaan dari waktu ke waktu.

Dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada stakeholder, perusahaan harus mampu memaksimalkan laba atau keuntungan. Dalam hal ini diwujudkan dengan meningkatkan penghasilan perusahaan setelah pajak, dengan keuntungan yang maksimal, maka dari itu tujuan ini dapat dicapai. Tujuan perusahaan dalam meningkatkan citranya dapat dicapai dengan mengubah pandangan masyarakat dan pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Memiliki sikap dan pandangan yang positif terhadap perusahaan, sehingga aktivitas akan memperoleh kepercayaan yang baik. Mendapatkan kepercayaan dari berbagai pihak dengan dan diharapkan perusahaan dapat berdiri dalam waktu yang lama. Perusahaan sendiri memiliki beberapa klasifikasi, menurut Jamal Wiwoho terdapat klasifikasi perusahaan berdasarkan dengan bentuk usaha atau status hukum dari perusahaan. Hal ini dapat menjelaskan dengan tegas statud dan bentuk usaha perusahaan tersebut. Berdasarkan klasifikasi tersebut, yang termasuk bentuk usaha yang berbadan hukum ialah PT, Koperasi, Perusahaan Negara (BUMN), dan Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Yudho Taruno M, 2017).

1. Perusahaan Daerah (BUMD)

BUMD atau yang dikenal dengan perusahaan daerah di Indonesia mulai ada pada zaman Hindia Belanda. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang perusahaann daerah menyebutkan bahwa perusahaann daerah adalah perusahaan yag didirikan dengan modal yang sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. (*Pasal 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah*, n.d.) Kekayaan Daerah yang dipisahkan berarti kekayaan Daerah dilepaskan dari penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui Anggaran Belanja Daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan tersendiri. Menurut M. Natzir Said BUMD memiliki sistem pengelompokan berdasarkan kepemilikan modal yang terbagi menjadi tiga yang masih dijalankan BUMD yang ada di daerah berdasarkan jenis usahanya. Adapun jenis tersebut antara lain: dibidang perbankan, PDAM, dan aneka usaha. Adapun berdaasarkan status badan hukumnya BUMD dalam UU dibagi menjadi dua yaitu non-persero,dan persero.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan badan udaha yang permodalannya khusus karena milik pemerintah daerah. Kebijakan utama dalam mengelola BUMD harus bisa mendapatkan persetujuan dari eksekutif dan legislative terutama dalam hal permodalan. Akibatnya penambahan modal sangat bergantung pada kondisi dan keadaan keuangan pemerintah daerah serta dinamika politik yang berkembang yang memiliki konsekuensi permohonan disetujui atau ditolak. Kondisi ini akan memakan waktu dan proses yang cukup Panjang, dari segi bisnis dapat dikatakan kondisi ini menjadi urang efektif.

2. Perusahaan Air Minum (PERUMDA AIR MINUM).

Perusahaan air minum merupakan suatu perusahaan yang mengelolah air untuk masyarakat. Adapun status hukum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda). Terdapat beberapa perbedaan yang mendasar dari sebelumnya yakni saat ini menjadi perusahaan umum yang membolehkan PDAM membentuk unit bisnis baru yang dapat memberi keuntungan. Kemudian posisi pemerintah daerah dalam hal ini Bupati semakin diperkuat posisinya menjadi Kuasa Pemilik Modal (KPM).

E. Analisis *Good Corporate Governance* Pada Pengelolaan Keuangan Di Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta Kabupaten Pasuruan

Prinsip dasar pertanggung Jawaban (*Responsibility*) menjelaskan bahwa perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber merujuk pada pedoman wawancara yang disusun untuk melihat bagaimana prinsip GCG dalam pengelolaan keuangan Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta Kabupaten Pasuruan. Peneliti bertanya terkait pertanyaan kesatu Apakah manajer dan Pegawai Bagian Keuangan telah bekerja sesuai dengan standar operasional, prosedur maupun ketentuan yang berlaku di Bagian Keuangan? Pernyataan Ibu Alam Paramita Dewi “*Yah, jadi bagian keuangan ini ketika proses-proses itu sudah selesai dikerjakan maka masuklah dibagian keuangan nah, bagian keuangan ini tentunya melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang ada, itu baru diproses*”

Pernyataan Ibu Alam Paramita Dewi “*Ya Manajer dan Pegawai Bagian Keuangan telah bekerja sesuai dengan standar operasional, prosedur maupun ketentuan yang berlaku di bagian keuangan ini*” Berdasarkan hasil wawancara pertanyaan kesatu Prinsip pertanggungjawaban, manajer dan Pegawai Bagian Keuangan telah bekerja sesuai dengan standar operasional, prosedur maupun ketentuan yang berlaku di Bagian Keuangan, ketika proses-proses itu sudah selesai dikerjakan maka masuklah dibagian keuangan, bagian keuangan melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang ada, kemudian diproses. Kedua peneliti bertanya terkait Bagaimana upaya Bagian Keuangan menghindari kerugian yang terjadi? pernyataan ibu Alam Paramita Dewi dibagian keuangan “*Jadi, bagian keuangan menghindari kerugian yang terjadi itu ketika ada laporan. Membuat satu laporan bahwa ini perlu kita lakukan efisiensi karena dia itu berdasarkan dengan RKA yang ada (rencana keperluan anggaran) jadi sebelum kita berinteraksi dengan transaksi yang ada, itu tadi memang sudah ada estimasi, sudah ada anggaran yang ditetapkan. Contoh ini tahun kita punya program bekerja oh ini, oh begini jadi begitu yaa*” Berdasarkan hasil wawancara pertanyaan kedua Prinsip pertanggungjawaban, upaya Bagian Keuangan menghindari kerugian yang terjadi dengan membuat satu laporan bahwa ini yang perlu dilakukan efisiensi karena dia itu berdasarkan dengan RKA yang ada (rencana keperluan anggaran) jadi sebelum mereka berinteraksi dengan transaksi yang ada, itu sudah ada estimasi, sudah ada anggaran yang ditetapkan.

Ketiga peneliti bertanya terkait Apakah proses pendelegasian kewenangan telah dijalankan dengan cukup dan baik demi terselenggaranya pekerjaan? Pernyataan Pak Yusuf dibagian Kepala Umum “*Iya. Jadi pendelegasian kewenangan itu yaa. Itu tadi seum Perumda Air Minumnya contoh: ketika Si ABC berhalangan apa dan sebagainya ini tadi didelegasikan kebawa.*

Didelegasikan kebawa itu ada penunjukan surat tugas” Pernyataan Alam Paramita Dewi “*yab. telah dijalankan dengan cukup baik demi terselenggaranya pekerjaan*” Pernyataan pak indra irmawan dibagian GCG “*iyah, proses pendelegasian kewenangan juga telah dijalankan dengan cukup dan baik demi terselenggaranya suatu pekerjaan*” Berdasarkan hasil wawancara pertanyaan ketiga Prinsip pertanggungjawaban, proses pendelegasian kewenangan telah dijalankan dengan cukup dan baik demi terselenggaranya pekerjaan. contoh: ketika Si ABC berhalangan apa dan sebagainya ini kemudian didelegasikan kebawah, didelegasikan kebawah itu ada penunjukan surat tugas. Keempat peneliti bertanya terkait Apakah kepala bidang dan Pegawai melakukan pertanggungjawaban hasil kerja secara teratur? pernyataan pak yusuf dibagian kepala umum “*yah saya rasa sudah dijalankan dengan baik*” pernyataan pak indra irmawan dibagian GCG “*iyaa, Bentuk tanggung jawab yang dilakukan pegawai dari hasil kerja teratur adalah laporan bulanan*”

Berdasarkan pertanggungjawaban, hasil wawancara pertanyaan keempat Prinsip kepala bidang dan Pegawai melakukan pertanggungjawaban hasil kerja secara teratur dan melakukan tanggungjawab dari hasil kerja teratur yaitu laporan bulanan. Prinsip dasar pertanggungjawaban (*Responsibility*) menjelaskan bahwa perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Pertanggung jawaban ialah kesusuaian atau kepatuhan dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diwujudkan dengan kesadaran akan tanggung jawab dari adanya wewenang, sadar akan tanggung jawab sosial, menjadi profesional dan menjunjung etika dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan memelihara lingkungan bisnis. Pelaksanaan prinsip ini, diharapkan setiap bagian atau anggota dalam perusahaan harus berhati-hati dan memastikan patuh terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan perusahaan.

Berdasarkan pernyataan dari keempat informan pada Perumda Air MinumGiri Nawa Tirta Kabupaten Pasuruan, peneliti merangkum pernyataan informan tersebut menjadi satu jawaban. Manajer dan Pegawai Bagian Keuangan telah bekerja sesuai dengan standar operasional, prosedur maupun ketentuan yang berlaku diBagian Keuangan. ketika proses dibagian keuangan selesai tentunya pegawai bagian keuangan di Perumda Air Minum melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang ada sehingga dapat diproses. Upaya yang dilakukan bagian keuangan dalam meminimalisir kerugian yang terjadi dengan membuat satu laporan RKA (rencana keperluan anggaran) yang mana diperlukan untuk efisiensi. Sebelum adanya transaksi, estimasi biaya atau anggaran telah ditetapkan. Selanjutnya untuk pendelegasian kewenangan itu seperti contoh berikut: ketika pihak A berhalangan maka hal itu didelegasikan kebawa, yang dimaksud didelegasikan kebawa itu ada penunjukan surat tugas. Kemudian kepala bidang maupun pegawai melakukan pertanggungjawaban hasil kerja secara continue, secara teratur dilakukan. Pengelolaan keuangan Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta Kabupaten Pasuruan telah mengikuti Prinsip Pertanggungjawaban terkait kepatuhan dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan keuangan dibutuhkan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran uang yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan pembahasan di

atas sehingga perusahaan air minum dapat dikatakan mulai menerapkan prinsip pertanggungjawaban yang termasuk dalam GCG.

Prinsip dasar kemandirian adalah keadaan perusahaan yang dikelola dengan profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan harus dikelola secara independent sehingga setiap bidang dalam perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber merujuk pada pedoman wawancara yang disusun untuk melihat bagaimana prinsip GCG dalam pengelolaan keuangan Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta Kabupaten Pasuruan. Peneliti bertanya terkait pertanyaan kesatu Saat mengelolah keuangan, Pegawai menghindari terjadinya didominasi oleh pihak manapun? Pernyataan ibu Alam Paramita Dewi dibagian keuangan *"Iya. Jadi itu tadi saya katakan bahwa di pekerjaan yang satu itu tentunya kita tidak asal menempatkan orang itu tadi jadi, ada prinsip the right man on the right place (penempatan seseorang sesuai dengan bidangnya) nah, jadi kita menempatkan orang sesuai dengan bidangnya karena kenapa, ini ada target yang kita mau capai. Apa gunanya kita menempatkan seseorang ini tetapi bukan tupoksinya, tentunya kalau bukan tupoksinya artinya kita mau capai kedepan ini sesuai dengan itu tadi, ada kaitannya dengan GCG itu yakin dan percaya tidak akan tercapai"*

Pernyataan pak indra irmawan dibagian GCG *"Iyah. Jadi pimpinan pun tidak asal menempatkan pegawai, kami ditempatkan pada bidang kami masing masing jadi, pegawai di bagian keuangan pastinya menghindari hal yang seperti itu agar data-data yang di dapatkan tidak di ganggu oleh pihak manapun"* Berdasarkan hasil wawancara pertanyaan kesatu Prinsip kemandirian, Saat mengelolah keuangan, Pegawai menghindari terjadinya didominasi oleh pihak manapun Jadi direktur mengatakan bahwa di pekerjaan yang satu itu tentunya perusahaan tidak asal menempatkan karyawan, ada prinsip the right man on the right place (penempatan seseorang sesuai dengan bidangnya) nah, jadi perusahaan menempatkan orang sesuai dengan bidangnya karena kenapa, ini ada target yang ingin di capai. Apa gunanya menempatkan seseorang ini tetapi bukan tupoksinya, tentunya kalau bukan tupoksinya artinya perusahaan mau capai kedepan ini sesuai dengan, ada kaitannya dengan GCG itu yakin dan percaya tidak akan tercapai.

Kedua peneliti bertanya terkait Bagaimana cara pegawai agar tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif? Pak indra irmawan dibagian GCG *"iyah, cara pegawai agar tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif para pegawai tentunya telah mengetahui bahwa jam kerja yaa kerja diluar jam kerja bebas"* Pak yusuf dibagian kepala umum *"iya, agar tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif yaa tentunya para pegawai tahu kalau pada saat jam kerja tidak ada yang boleh meninggalkan pekerjaannya sesuai dengan peraturan yang ada, kecuali dalam keadaan penting dan harus izin kepada pimpina"* Pernyataan ibu Alam Paramita Dewi dibagian keuangan *"Pegawai telah memiliki modal dalam bidang keahliannya dan disiplin dalam bekerja kemudian pegawai harus melaksanakan apa yang telah di tugaskan dan bertanggung jawab atas pekerjaannya"* Berdasarkan hasil

wawancara pertanyaan kedua Prinsip kemandirian, cara pegawai agar tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif mereka sudah dibekali, disiplin dalam hal bekerja kemudian pegawai harus melaksanakan apa yang telah di tugaskan dan bertanggung jawab atas pekerjaannya.

Ketiga peneliti bertanya terkait Apakah Pegawai harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan, dan tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif? Pernyataan pak yusuf dibagian kepala umum *"Iya. Jadi pekerjaan ini orang tidak boleh melempar tanggungjawab, jadi tanggungjawab si A dilempar sini tidak boleh, jadi masing-masing bertanggung jawab sesuai dengan tupoksinya masing-masing"* Pernyataan pak indra irmawan dibagian GCG *"Iya, semua pegawai yang bekerja disini harus bertanggung jawab atas pekerjaannya dan tidak boleh memberikan pertanggungjawaban kepada pihak manapun"* Berdasarkan hasil wawancara pertanyaan ketiga Prinsip kemandirian, Pegawai harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan, dan tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif, masing-masing bertanggung jawab sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Prinsip dasar kemandirian adalah keadaan perusahaan yang dikelola dengan profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan harus dikelola secara independent sehingga setiap bidang dalam perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Pedoman pelaksanaan asas ini adalah bahwa masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif. Kemudian, masing masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.(Manossoh, 2016)Berdasarkan pernyataan dari keempat informan pada Perumda Air MinumGiri Nawa Tirta Kabupaten Pasuruan, peneliti merangkum pernyataan informan tersebut menjadi satu jawaban. Dalam pengelolaan keuangan Perumda Air Minum menghindari terjadinya didominasi oleh pihak manapun jadi pekerjaan yang satu itu tentunya untuk dibagian pengelolaan keuangan pihak Perumda Air Minum tidak asal menugaskan pegawai tetapi menggunakan prinsip the right man on the right place (penempatan seseorang sesuai dengan bidangnya) hal tersebut dilakukan guna memenuhi ini target yang akan pihak Perumda Air Minum capai.

Apa gunanya kita menempatkan seseorang ini tetapi bukan tupoksinya, tentunya kalau bukan tupoksinya artinya kita mau capai kedepan ini sesuai dengan itu tadi ada kaitannya dengan GCG itu yakin dan percaya tidak akan tercapai. Selanjutnya cara pegawai agar tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif, Jadi pegawai Perumda Air Minum sudah dibekali oleh ilmu tentang disiplin dalam hal bekerja, dan menanamkan bahwa pegawai tidak boleh memungut apapun di masyarakat itu dalam hal

pelayanan. sebagai contoh ketika pelanggan Perumda Air Minum memiliki masalah seperti kebocoran pipa pegawai Perumda Air Minum yang memperbaiki kerusakan pipa tersebut tidak dibayar. Pegawai Perumda Air Minum harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan, dan tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif. pertanyaan selanjutnya terkait keputusan pimpinan, pihak Perumda Air Minum menyatakan tidak di interpeksi oleh pihak-pihak diluar. Jadi keputusan pimpinan ini berdasarkan dengan SOP yang dari bawah. Proses pengambilan keputusan di bagian keuangan Perumda Air Minum telah dilakukan secara obyektif. Keputusan secara obyektif sesuai dengan data-data yang ada terkumpul kemudian membuatlah satu kesimpulan, satu keputusan bahwa langkah kedepan kita harus lakukan adalah ini.

Pengelolaan keuangan Perumda Air MinumGiri Nawa Tirta Kabupaten Pasuruan telah mengikuti Prinsip Kemandirian bahwa masing-masing organ perusahaan menghindari terjadinya didominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif. Dengan kata lain pengelolaan keuangan pihak Perumda Air Minum disusun tanpa campur tangan orang lain hanya pihak yang terkait yang dapat mengolah demi menghindari hal-hal yang telah dijelaskan. Sehingga dalam pengelolaan keuangan Perumda Air Minum mulai menerapkan prinsip Kemandirian yang termasuk dalam GCG. Kewajaaran dapat juga disebut dengan kesetaraan, dimana ini merujuk pada perlakuan yang adil dan setara. Setara dalam memenuhi hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber merujuk pada pedoman wawancara yang disusun untuk melihat bagaimana prinsip GCG dalam pengelolaan keuangan Perumda Air MinumGiri Nawa Tirta Kabupaten Pasuruan.

Peneliti bertanya terkait pertanyaan kesatu Dalam pengelolaan keuangan apakah direktur maupun Pegawai dapat memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan mereka pada pembuatan laporan keuangan? Pernyataan ibu Alam Paramita Dewi dibagian keuangan *"Iya. Jadi pada saat laporan keuangan kita mau sajikan, itu tadi telah disajikan ini kan kita melakukan rapat bahwa posisi laporan keuangan kita ini adalah oh ini, posisi begini"* Pernyataan pak indra irmawan dibagian GCG *"iyya, dalam pengelolaan keuangan direktur maupun pegawai dapat memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bersama dalam pembuatan laporan keuangan"* Pernyataan pak yusuf dibagian kepala umum *"Iya. Jadi direktur maupun pegawai dapat memberikan masukan dan menyampaikan pendapatnya dalam pembuatan laporan keuangan"* Berdasarkan hasil wawancara pertanyaan kesatu Prinsip kewajaran, Dalam pengelolaan keuangan apakah direktur maupun Pegawai dapat memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan mereka pada pembuatan laporan keuangan. Pada saat laporan keuangan mereka sajikan, kemudian mereka melakukan rapat bahwa posisi laporan keuangan begini dan oh ini begini kemudian posisinya begini.

Kedua peneliti bertanya terkait Apakah (kepala bidang) memberikan perlakuan yang setara dan wajar sesuai dengan kontribusi yang dilakukan oleh Pegawai? Pernyataan pak yusuf dibagian kepala umum *"Iya. Jadi pegawai itu ketika memberikan saran dan masukan sama dengan*

saran masukan dalam hal saran perbaikan terhadap perusahaan. Yaa itu kita terima, seperti kondisi dilapangan begini, kasusnya begini atau tidak begini itu kita terima” Pernyataan pak indra irmawan dibagian GCG *“yah, Direktur (kepala bidang) memberikan perlakuan yang setara dan wajar sesuai dengan kontribusi yang dilakukan oleh pegawai”* Berdasarkan hasil wawancara pertanyaan kedua Prinsip kewajaran, direktur (kepala bidang) memberikan perlakuan yang setara dan wajar sesuai dengan kontribusi yang dilakukan oleh Pegawai Jadi pegawai Perumda Air Minum ketika memberikan saran dan masukan sama dengan saran masukan dalam hal saran perbaikan terhadap perusahaan. Iya itu mereka terima, seperti kondisi dilapangan begini, kasusnya begini atau tidak begini itu mereka terima. Ketiga peneliti bertanya terkait Bagaimana direktur (kepala bidang) memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder secara wajar menurut ketentuan yang berlaku umum? Pernyataan pak yusuf dibagian kepala umum *“Jadi Perumda Air Minum ini memberikan perhatian kepada stakeholder yah, dari hal tingkat kepercayaan yah, itu bahwa program-program yang kita lakukan di Perumda Air Minum itu diantaranya adalah ini, ada macam-macam. Supaya untuk membangun tingkat kepercayaan kepada masyarakat”*

Berdasarkan hasil wawancara pertanyaan ketiga Prinsip kewajaran, direktur (kepala bidang) memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder secara wajar menurut ketentuan yang berlaku umum. Jadi Perumda Air Minum ini memberikan perhatian kepada stakeholder, dari hal tingkat kepercayaan, bahwa program-program yang mereka lakukan di Perumda Air Minum itu diantaranya adalah ini, ada macam-macam. Supaya untuk membangun tingkat kepercayaan kepada masyarakat. Keempat peneliti bertanya terkait Dalam proses pengelolaan keuangan, Pegawai diberikan kesempatan yang sama dalam melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, jender, dan kondisi fisik? Pernyataan ibu Alam Paramita Dewi dibagian keuangan *“yah, dalam proses pengelolaan keuangan, Pegawai diberikan kesempatan yang sama dalam melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, jender, dan kondisi fisik”* Pernyataan pak yusuf dibagian kepala umum *“iyaa, Perusahaan ini memperhatikan dan menilai bahwa karyawan ini memiliki kepribadian yang baik”* Berdasarkan hasil wawancara pertanyaan keempat Prinsip kewajaran, Dalam proses pengelolaan keuangan, Pegawai diberikan kesempatan yang sama dalam melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, jender, dan kondisi fisik.

Kewajaran dapat juga disebut dengan kesetaraan, dimana ini merujuk pada perlakuan yang adil dan setara. Setara dalam memenuhi hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini diwujudkan dengan cara membuat peraturan korporasi yang akan melindungi kepentingan minoritas. Dalam pelaksanaan prinsip ini, Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing. Juga, perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

Berdasarkan pernyataan dari keempat informan pada Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta Kabupaten Pasuruan peneliti merangkum pernyataan informan tersebut menjadi satu jawaban. Dalam pengelolaan keuangan Manager maupun Pegawai dapat memberikan masukan

dan pendapat mereka dalam pembuatan laporan keuangan, jadi pada saat laporan keuangan telah disusun oleh bagian keuangan tentunya pihak Perumda Air Minum melakukan rapat dan dalam rapat tersebutlah pegawai ataupun manager dapat memberikan saran atau masukan dalam perbaikan terhadap perusahaan. selanjutnya Perumda Air Minum telah memberikan perhatian kepada stakeholder dari hal tingkat kepercayaan bahwa program-program yang dilakukan Perumda Air Minum adalah melakukan hal-hal yang dapat membangun tingkat kepercayaan kepada masyarakat. Dalam proses pengelolaan keuangan, Pegawai Perumda Air Minum diberikan kesempatan yang sama dalam melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, jender, dan kondisi fisik, Jadi ini dalam hal kinerja kepada karyawan berkaitan dengan hal tersebut.

Pihak Perumda Air Minum senantiasa memperhatikan dan mengajarkan kepada pegawai tentang nilai attituden yang bagus agar tetao terjaga. dalam Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta Kabupaten Pasuruan Perlakuan adil kepada seluruh pihak pemegang kepentingan (pelanggan, pemilik) dalam memberikan pelayanan dan informasi sudah dilakukan dengan semaksimal dan sebaik mungkin kira-kira begitu yah. Jadi pegawai itu kita perlakukan adil dan wajar, adil dan wajar ini kita tidak ada membedakan antara si A dan si B antara golongan, golongan ini kita samakan. Pengelolaan keuangan Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta Kabupaten Pasuruan telah mengikuti Prinsip Kewajaran bahwa Perusahaan memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan. Perumda Air Minum juga memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Termasuk dengan pengelolaan keuangan di perusahaan air minum yang jujur, disiplin, dan fleksibilitas. Hal tersebut masuk kedalam prinsip kewajaran dapat dikatakan Perumda Air Minum mulai menerapkan Prinsip Kewajaran yang termasuk dalam GCG.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan pada Bab IV maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Transparansi pengelolaan keuangan di Perumda Air MinumGiri Nawa Tirta Kabupaten Pasuruan terlaksana dengan baik, dimana transparansi pengelolaan keuangan meliputi dalam keterbukaan, pengumpulan, dan pelaporan informasi terkait keuangan perusahaan.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan di Perumda Air MinumGiri Nawa Tirta Kabupaten Pasuruan terlaksana dengan baik, dimana Akuntabilitas pada fungsi, sistem, struktur, dan pertanggung jawaban orang-orang perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana dengan efektif.
3. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di Perumda Air MinumGiri Nawa Tirta Kabupaten Pasuruan terlaksana dengan baik, dimana dapat dilihat dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kemandirian pengelolaan keuangan di Perumda Air MinumGiri Nawa Tirta Kabupaten Pasuruan terlaksana dengan baik, dimana dapat dilihat bahwa masing-

masing organ perusahaan menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.

5. Kewajaran pengelolaan keuangan di Perumda Air MinumGiri Nawa Tirta Kabupaten Pasuruan terlaksana dengan baik, dimana dapat dilihat bahwa perusahaan memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan juga memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

Daftar Pustaka

- Amelinda, T. N., & Anwar, M. K. (2021). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(1), 33–44. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n1.p33-44>
- Edi Wibowo. (2016). Implementasi Good Corporate Governance Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 10(2), 1–23.
- Gunawan, A., Julita, Rambe, H. M. F., Parlindungan, R., Kurniawan G, D., & Cristina, I. (2016). *Pengantar Manajemen Keuangan* (Vol. 2, Issue Kb 2).
- Haryoso. (1997). *Manajemen Kinerja*. Persada.
- Hidayat, K., Gunawan, E., & Gunawan, Y. (2022). Analisis Strategi Pengelolaan Keuangan Bisnis di Masa Pandemi Pada Pelaku Bisnis Generasi Milenial di Wilayah Bandung. *Jurnal Akuntansi*, 14(1), 45–55. <https://doi.org/10.28932/jam.v14i1.4006>
- Kementrian Pendidikan, K. (n.d.). *Riset, dan Teknologi, Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Kuswadi. (2015). *Meningkatkan Laba Melalui Pendekatan Melalui Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Biaya*.
- Manossoh, H. (2016). Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan. In *PT Norlive Kharisma Indonesia : Bandung* ISBN: 978-602-73706-6-1.
- Merida, S. E., & Ak, M. (n.d.). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Perbankan. *Ejournal.Stieppi.Ac.Id*.
- Pasal 2 Undang-Undang No.5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah*. (n.d.).
- Sentosa, S. (2006). *Hukum Perusahaan dalam Peraturan Perundang-undangan*. 6.
- Sugiono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan RD*. Alfabeta.
- Sugiono, S. (2020). Industri Konten Digital dalam Perspektif Society 5.0. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komunikasi*, 22(2), 175–191.
- Sulistiowati, S., & Nurmansyah, A. L. (2017). Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal. *Monex Journal Research Accounting Politeknik Tegal*, 6(1). <https://doi.org/10.30591/monex.v6i1.456>
- Weston, J.F. dan Copeland, T. (1998). *Manajemen Keuangan*.
- Yudho Taruno M. (2017). *Tata Kelola BUMD: Konsep, Kebijakan, dan Penerapan Good Corporate Governance*. Intrans Publishing.